

# BAB I

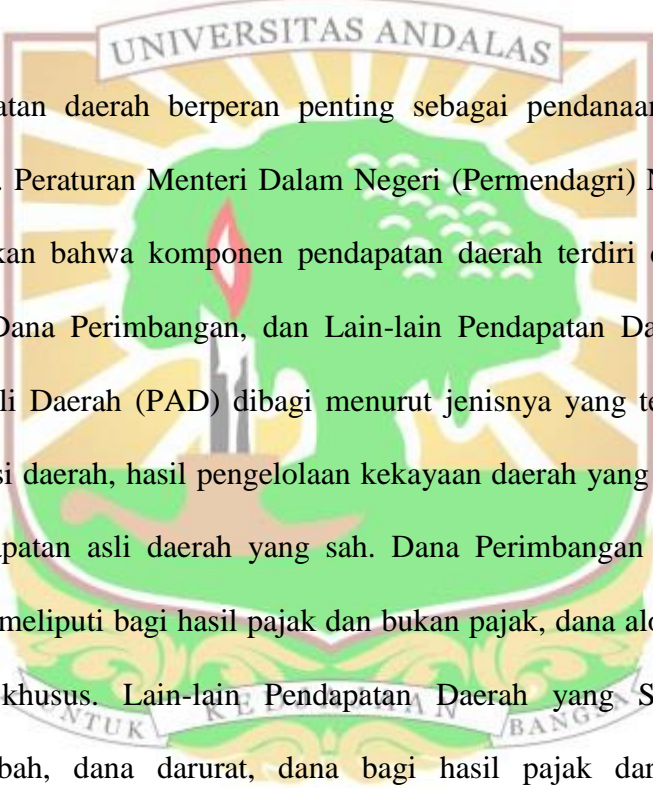
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha serta akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing. Dalam menjalankan pembangunan tersebut pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan mengarah kepada cita-cita pembangunan yang diharapkan.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5

(lima) tahun, yang memuat kebijakan dalam mengelola keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

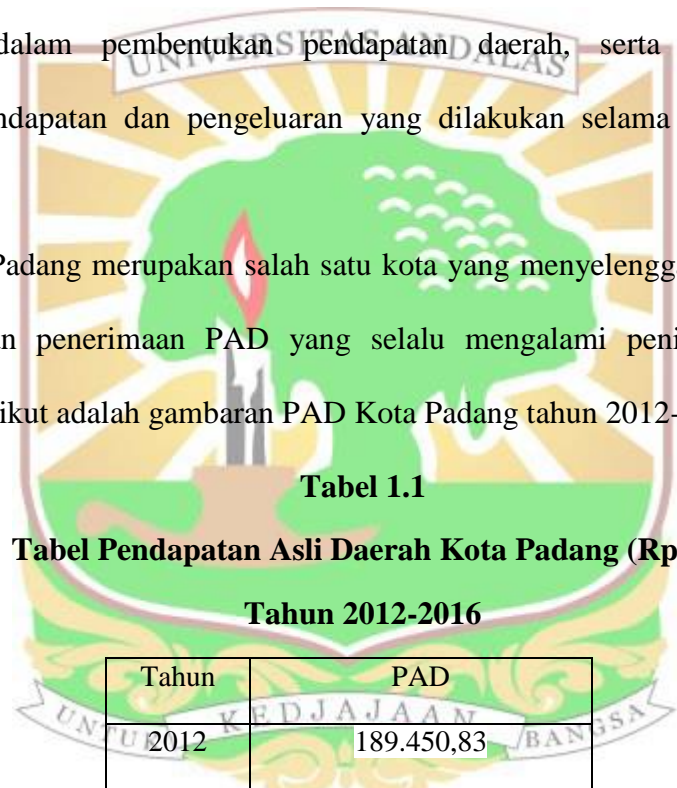
The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow sunburst background. Below the tree is a white figure holding a torch. At the bottom, a banner reads "UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA".

Pendapatan daerah berperan penting sebagai pendanaan pembangunan dalam RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Untuk mengetahui potensi pendapatan daerah perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Kinerja keuangan dianalisis menggunakan rasio keuangan yang secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada

lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten/kota masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai namadan kaidah pengukurannya (Prmono, 2014). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menyelenggarakan otonomi daerah dengan penerimaan PAD yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah gambaran PAD Kota Padang tahun 2012-2016:



**Tabel 1.1**

**Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Padang (Rp. Juta)**

**Tahun 2012-2016**

Tahun	PAD
2012	189.450,83
2013	238.871,89
2014	315.677,80
2015	370.413,74
2016	392.315,69

*Sumber: DPKA Kota Padang*

Berdasarkan data diatas PAD di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. PAD pada tahun 2012 merupakan pendapatan asli daerah terendah di Kota Padang yaitu sebesar Rp.189.450,83 Juta. Tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp.238.871,89 Juta. Tahun 2014 naik sebesar Rp.315.677,80 Juta. Kemudian tahun 2015 meningkat sebesar Rp.370.413,74 Juta dan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp.392.315,69 Juta. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan PAD yang bersumber dari kelompok pajak daerah dan lain lain PAD yang sah.

Alasan penulis memilih Kota Padang sebagai objek penelitian karena Kota Padang sebagai salah satu kota terpadat kependudukannya di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 914.968 jiwa (BPS, 2016) yang mengharuskan pemerintah daerah mendongkrak pendapatan daerah untuk melakukan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pencapaian kinerja pendapatan Kota Padang melalui beberapa analisis rasio, serta melihat bagaimana penerimaan dan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tiap tahunnya.

Pada penelitian ini penulis ingin merincikan lingkup penelitian kepada analisis pencapaian kinerja pendapatan RPJMD. Penulis menggunakan analisis rasio berupa analisis kinerja pendapatan yang terdiri dari: analisis rasio pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat sentralisasi fiskal dan rasio efektifitas. Akan tetapi penulis hanya menggunakan salah satu dari rasio keuangan yaitu rasio efektifitas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian **“ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA: PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET PENDAPATAN RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2012-2016”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, muncul beberapa masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dengan target pendapatan RPJMD Kota Padang tahun 2012-2016 dilihat dari rasio efektifitas?
2. Bagaimanakah pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PAD Kota Padang tahun 2012-2016 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dengan target pendapatan RPJMD Kota Padang tahun 2012-2016 dengan rasio efektifitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PAD Kota Padang tahun 2012-2016.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam segi pendapatan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

3. Bagi Masyarakat

Dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan salah satu dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

## BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini.

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Ukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah), kesimpulan mengenai penelitian terdahulu yang menunjang penelitian dan kerangka berfikir penelitian.

## BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

## BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

## BAB V: Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.

